BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Pemberdayaan Ekonomi Nelayan

Pada prinsipnya, ikan dan uang hasil penjualan ikan dibagi habis sesuai tugas dan tanggung jawab pemuda (juragan) dan pekerja (nelayan atau aawak kapal). Pemuda memperoleh bagian yang lebih besar atas resiko kehilangan modalnya, nelayan memperoleh bagian lebih kecil atas resiko kehilangan nyawanya.

Dalam hubungan kerja, juragan secara formal berhubungan dan menjalankan kontrak kerja dengan juru mudi. Juru mudi memimpin awak kapal yang dibantu oleh sejumlah ABK yang dipilihnya sendiri. ABK berhubungan, menjalankan kerja dan bertanggung jawab kepada juru mudi. Juragan tidak ikut campur.

Pembagian uang hasil penjualan ikan dilaksanakan berkala, umumnya sebulan, setelah dipotong biaya operasional, yaitu : Solar, Oli, Kerusakan Mesin dan lain-lain, hasil bersih dibagi tiga dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

a. Juragan sebagai pemodal memperoleh 2/3 bagian, juragan harus mengeluarkan 10% bagiaanya untuk juru mudi sebagai persenan.
b. Nelayan (jruu mudi+ABK) memperoleh 1/3 bagian.[9]

[9] Hasil wawancara dengan Bpk. Muhdar, Diambil pada tanggal 17 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisir, wilayah pesisir merupakan wilayah transisi yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan lautan atau sebaliknya.

Sebagian besar masyarakat pesisir hidup dari mengelola sumber daya pesisir dan laut, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu dari perspektif matapencahariannya, masyarakat pesisir tersusun dari kelompok-kelompok masyarakat yang beragam, seperti Nelayan, petambak, dagang ikan, pemilik took, serta pelaku industry kecil dan menengah pengolahan hasil tangkap. Keberagaman jenis pekerjaan penduduk dikawasan pesisir ini juga ditentukan oleh kondisi struktur sumber daya ekonomi local.

Kehidupan sosial bukan merupakan barang cetakan (*molded*), melainkan suatu proses berkesinambungan yang selalu membaharuk, bertumbuh-kembang dan berubah. Setiap gejala niscaya berada dalam keadaan "menjadi". Para pakar sosiologi menunjuk pada perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang waktu sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya.[10]

---

[10] Mudjia Rahardjo. *Sosiologi Pedesaan.* (Malang : UIN-Malang Press), hal. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan pembangunan masyarakat pesisir adalah perubahan sosial masyarakat pesisir yang dikendalikan itu dan sudah barang tentu pembangunan sebagai sosial tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi, melainkan menyangkut segenap aspek kehidupan masyarakat yang hidup di pesisir Raas.

Pembangunan masyarakat pada hakekatnya bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kekuatan masyarakat baik yang berupa material maupun non-material agar dapat mempertahankan hidupnya sendiri dan orang lain.[11]

Konsep pemberdayaan ditujukan untuk masyarakat dan tidak hanya bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat, karena setiap satuan masyarakat mempunyai kekuatan sendiri yang disebut *Commonity Power* oleh Nelson W, misalnya kerukunan, keakraban, solidaritas, dan kebersamaan. *Community Development* menjadi lebih penting lagi jika diingat bahwa masyarakat atau *community* perlu dipersiapkan untuk memasuki bentuk masyarakat yang disebut *society,* sehingga kedua bentuk ideal tersebut merupakan sebuah continium.

Menurut beberapa sumber di Raas bahwa selama ini pemanfaatan dan pengelolaan keluatan dan perikanan di kawasan pesisir selalu dihadapkan pada beberapa kendala, setidaknya ada delapan persoalan

---

[11] Azyumardi Azra. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,* (Jakarta : IAIN Jakarta Press. 2000), hal 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok yang menjadi permasalahan nyata secara berkelanjutan dimasing-masing daerah, diantaranya meliputi :

1) Over fishing, terutama diperairan pantai.
2) Pemanfaatan yang kurang maksimal diperairan lepas pantai dan laut dalam.
3) Teknologi, umumnya alat tangkap yang digunakan masih tradisional dan variasi alat tangkap kecil.
4) Sumber daya manusia, lemahnya kemampuan sumber daya manusia dan masih rendahnya keinginan menyeluruh dari pihak birokrasi untuk pengembangan perikanan.
5) Kerusakan habitat dan degredasi lingkungan.
6) Lemahnya peraturan dan penegakan hukum.
7) Kelembagaan perikanan yang belum atau tidak profesional.
8) Belum adanya tata ruang pesisir.

Di kawasan pesisir yang sebagian besar penduduknya bekerja menangkap ikan, kelompok masyarakat nelayan merupakan unsure terpenting bagi eksistensi masyarakat pesisir, mereka memiliki peranan yang sangta besar dalam mendorong kegiatan ekonomi wilayah dan pembentukan struktur sosial-*budaya* masyarakat pesisir. Sekalipun masyarakat nelayan memiliki kedudukan dan peranan sosial penting, tetapi hal ini tidak terlepas dari kontribusi kelompok-kelompok masyarakat lain yang mendukung aktivitas *sosial-ekonomi* masyarakat nelayan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang pekerjaannya melaut untuk menangkap ikan. Sebagian hasil tangkap ikan tersebut dikonsumsi untuk keperluan rumah tangganya atau dijual seluruhnya. Biasanya istri nelayan mengambil peranan dalam jual beli ikan dan urusan domestic rumah tangga, para istri nelayan memiliki tanggung jawab yang sepadan.

Tingkat produktivitas perikanan tidak hanya menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi perdagangan desa-desa pesisr, tetapi juga mempengaruhi pola-pola konsumsi penduduknya. Pada saat tingkat penghasilan besar, gaya hidup nelayan cenderung boros dan sebaliknyaketika musim peceklik tiba mereka akan mengencangkan ikan pinggang, bahkan tidak jarang barang-barang berharga yang dimilikinya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam masyarakat nelayan, struktur sosial yang terkonstruksi merupakan aktualisasi dari organisasi kehidupan di perahu. System organisasi nelayan ini member ruang yang luas bagi tumbuhnya penghargaan terhadap nilai-nilai prestatif, kompetetif, berorientasi keahlian, ikatan solidaritas sosial karena factor nasib dan tantangan alam, serta loyalitas terhadap pemimpin yang cerdas.

Karena itu, posisi sosial seorang nelayan atau pedagang ikan yang sukses secara ekonomis dan memiliki modal kultur, seperti suka berderma dan sudah berhaji, sangat di hormati oleh masyarakat di lingkungannya dan diikuti pendapatnya. Mereka ini merupakan modal sosial berharga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bias didaya gunakan untuk mencapai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pesisir.

2. Rasionalitas Pemberdayaan Ekonomi Nelayan

Dilihat dari pemilikan alat-alat produksi, masyarakat nelayan dibagi ke dalam dua kategori sosial, yaitu : a. Nelayan Pemilik, b. Nelayan Buruh. Kedua pihak di atas terikat oleh hubungan kerja sama dalam organisasi penangkapan. Jumlah nelayan buruh dalam setiap organisasi penangkapan tergantung pada jenis dan ukuran perahu serta alat tangkap yang dioprasikan. Misalnya, untuk perahu porsen atau paying, jumlah nelayan buruh mencapai 15 orang lebih, sedangkan untuk perahu (jukung)pancingan atau perahu yang mengoperasikan jaring sekitar 2-3 orang. Nelayan buruh memperoleh besaran pendapatan sesuai dengan system bagi hasil yang disepakati.

Dilihat dari skala usahanya, masyarakat nelayan terbagi menjadi dua kategori, yaitu nelayan besar dan nelayan kecil atau nelayan tradisional. Nelayan-nelayan yang mengoperasikan alat tangkap payang atau porsen termasuk kategori nelayan besar, sedangkan nelayan-nelayan yang mengoperasikan alat tangkap pancing atau jaring tradisional tergolong nelayan kecil. Nelayan besar memiliki orientasi ekonomis yang tinggi, sedangkan nelayan-nelayan kecil lebih banyak bersifat subsistensik.

Sebagai besar masyarakat nelayan terdiri atas nelayan buruh dan nelayan tradisonal yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan sosial ekonomi terbatas. Mereka tergolong kelompok sosial paling rentan secara ekonomis di desa-desa pesisir.

Bagi nelayan, investasi disektor perikanan tangkap membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebagian sumber pembiayaan di peroleh nelayan pemilik datri pinjaman dana kontan para pedagang ikan atau pedagang peranatara (*tengkulak*).

Para tengkulak ini juga menjalin hubungan kerja dengan nelayan buruh berdasarkan pinjaman ikatan. Kebutuhan nelayan pemilik menjalin kerjasama dengan tengkulak biasanya untuk kepentingan penmasarn, sedangkan bagi nelayan buruh untuk kepentingan pemasaran hasil tangkap dan pemenuhan kebutuhan konsumsi atau dana kontan secara mendesak.

Fakta kerjasama diantara mereka member hak kepada tengkulak untuk menjualkan hasil tangkapan nelayan dan mengambil potongan harga, yang besarnya sesuai dengan kebiasaan lokal, sebagai konpensasi ats pimjaman ikatan yang diberikan kepada nelayan.

Nelayan sebagai subjek produksi dalam relasi ekonomi tersebut tidak mengambil peranan penting dalam proses pemasaran hasil tangkap. Karena itu, kerjasama diantara mereka dalam jangka panjang lebih banyak memberikan keuntungan kepada para tengkulak.

Sejak tiga dasawarsa terahir ini setelah pemerintah meluncurkan program modernisasi perikanan pad awal 1970-an, telah berlangsung berbagai perubahan degradatif dibidang ekologi pesisir laut dan sosial ekonomi masyarakat nelayan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena rekanan penduduk terhadap sumbr daya laut semakin intensif sbagai akibat kegagalan pembangunan pedesaan, hal ini membawa dampak lanjutan pada timbulnya kondisi tangkap lebih (*overfishing*), kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dikalangan masyarakat nelayan. Kelompok masyarakat nelayan yang paling berat menanggung beban aikbat demikian adalah nelayan buruh dan nelayan lumayan kecil.

Kesulitan-kesulitan dibidang ekonomi tersebut bertambah berat jika pemerintah mengeluarkan kebiajkan-kebijakan yang tidak menguntungkan nelayan, seperti menaikkan harga BBM. Kebijakan Ini telah membesar biaya operasionalnya dan memperkecil jumlah pendapatan yang mereka terima.

Beban sosial ekonomi yang sangat berat dirasakan oleh masyarakat nelayan yang kondisi perairannya dalam keadaan tangkap lebih, seperti di pantai utara jawa atau di pesisir selat Madura.kesejahteraan sosial nelayan merosot tajam karena ketidak mampuan mereka meningkatkan produktivitas, kualitas konsumsi, akses kesehatan, dan pendidikan.

Pada saat ini, metodologi partisipasi untuk membangun desa sedang mengalami krisis. Terdapat berbagai konsep partisipasi, dari kata lain untuk mobilisasi (misalnya, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan) sampai konsep pilihan tindakan berdasarkan kesedaran diri.

Dari konsep partisipasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi proyek pembangunan (misalnya partisipasi masyarakat untuk mengurangi biaya buruh bangunan), sampai konsep partisipasi sebagai tujuan akhir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan. Tidak heran kalau partisipasi tidak selalu menghasilkan keberlanjutan pembangunan, sebaliknya bisa jadi tetap menghasilkan tirani dominasi lebih lanjut.

Ada beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting dalam perencanaan pembangunan, diantaranya meliputi:

a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dilapangan.
b. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persipan dan perencanaan. Karena akan mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki terhadap hasil proyek tersebut.
c. Adanya partisipasi umum dibanyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.[12]

Secara umum, PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Sedangkan secara khusus, PEMP bertujuan untuk :

---

[12] Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1992), hal. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawsan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang didampingi dengan pengembangan kegiatan sosial, pelestarian lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian masyarakat pesisir.
2) Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang terkait dengan sumberdaya perikanan dan kelautan.
3) Mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
4) Memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan dalam mendukung perkembangan wilayahnya.
5) Mendorong terwujudnya mekanisme manajemen pembangunan yang partisipatif dan transparan dalam kegiatan masyarakat.[13]

Sasaran PEMP adalah masyarakat pesisir yang memiliki mata pencaharian atau berusaha dengan memanfaatkan potensi peisisr seperti nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, pengolah ikan dan usaha jasa/kegiatan yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan, yang kurang berdaya dalam peningkatan/penguatan usahanya.

---

[13] Rokhmin, Dahuri. *Kebijakan dan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional*. Makalah pada acara *Ocean Out Look* BEM FPIK – IPB Tanggal 16 Mei 2004. Bogor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program ini menggunakan model pengembangan usaha yang bersifat perguliran/revolving yang dilakukan setelah ada keuntungan dan usaha kelompok telah kuat. Pinjaman modal melalui dana ekonomi produktif masyarakat yang diterima oleh sasaran wajib untuk dikembalikan agar terjadi perguliran kepada masyarakat pesisir lainnya yang membutuhkan serta terpilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atatu Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalanm rangka mensejahterkana dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu.[14]

Pembangunan dalam pengertian ekonomi murni menunjukkan taraf kemampuan ekonomi nasional suatu negara untuk beranjak dari tahap awal yang relatif statis menuju peningkatan tahunan secara konsisten dah disertai perubahan struktural dibidang agraria, industri dan jasa, produksi dan lapangan kerja.

Studi tentang pembangunan dapat dianggap bermula dari paham klasik tentang *Ekonomi-Politik* di abad ke delapan belas, namun akarnya dapat ditelusuri sampai pada hampir 25 abad yang lalu, ketika Plato dalam salah satu dialognya meletakkan dasar filosofis tentang hakekat negara

---

[14] Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai wadah bagi setiap warga negara untuk mencapai *Eudaimonia*, yaitu kebahagiaan sejati dan tertinggi, sedangkan Adam Smith yang di dalam buku *The Wealth of Nations* meletakkan dasar-dasar ekonomi pada zaman pembangunan sebagai suatu gerakan Internasional.[15]

Pembangunan untuk masyarakat (*Development for Community*) adalah bentuk praktek pembangunan masyarakat yang pada dasarnya masyarakat hanya menjadi obyek pembangunan karena inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh pihak aktor dari luar.

Walaupun aktor dari luar ini telah melakukan penelitian, melakukan konsultasi, dan melibatkan tokoh setempat namun apabila keputusan dan sumberdaya pembangunan berasal dari luar maka pada dasarnya masyarakat tetap menjadi objek pembangunan. Hal ini dapat terjadi apabila masyarakat yang kesadaran dan budayanya terdominasi.

Agar pendekatan dapat cukup efektif maka menurut Paulo Freire diperlukan pendidikan yang membebaskan (*Liberative Education*) bagi masyarakat untuk mengembangkan kesadaran kritis dan budaya tanding (*Counter Culture*) yang sesuai. Berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa development for community saja hanya akan menimbulkan ketergantungan yang semakin besar dari masyarakat.

Pembangunan dengan masyarakat (*Development with Community*) ditandai secara khusus dengan kuatnya pola kolaborasi antara aktor dari

---

[15] Taliziduhu Ndrah, *Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar dengan masyarakat setempat. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan sumberdaya yang dipakai berasal adari kedua belah pihak. Bentuk CD ini adalah yang paling populer dan banyak diaplikasikan oleh berbagai pihak.

Dasar pikiran pola ini adalah dapat dikembangkannya sinergi dari potensi yang dilmiliki oleh masyarakat lokal dengan yang dikuasai oleh aktor dari luar. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan juga diharapkan dapat mengembangkan rasa memiliki terhadap inisiatif pembangunan yang ada sekaligus membuat proyek pembangunan menjadi lebih efisien.

Pembangunan oleh masyarakat (*Development of Community*) adalah proses pembangunan yang baik inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaannya dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat menjadi pemilik dari semua proses pembangunan. Paran aktor dari luar dalam kondisi ini lebih sebagai sistem pendudkung bagi proses pembangunan.

Bentuk CD seperti ini yang diedealkan oleh berbagai pihak khususnya LSM dan pemerintah, namun dalam kenyataannya komunitas yang mampu membangun dirinya sendiri tidaklah terlalu banyak. Dan untuk mengarah pada bentuk pendekatan CD ini berbagai program peningkatan kapasitas (*Capacity Building*) untuk masyarakat lokal harus banyak dilakukan dengan harapan bila kapasitas masyarakat meningkat maka mereka akan mampu membangun dirinya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kajian Teori

Ilmu ekonomi sumberdaya dan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Salah satu isu besar dalam manajemen sumberdaya dan lingkungan adalah pemerataan kesejahteraan dalam suatu generasi / *Intra Generational Equity* dan antar generasi / *Inter Generational Equity*.[16]

Intra Generational *Equity* merupakan pemerataan kesejahteraan untuk setiap kelompok atau komunitas masyarakat dengan adanya pemanfaatan suatu sumberdaya. Setiap pemanfaatan sumberdaya, ada pihak yang mendapatkan keuntungan dan mengalami peningkatan kesejahteraan serta ada pula pihak yang mendapat dampak negatif dan berkurang kesejahteraannya.

Untuk itu perlu ada pemerataan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang mendapat dampak negatif. *Inter Generational Equity* merupakan pemerataan kesejahteraan dimana kesejahteraan yang dimiliki oleh generasi sekarang tidak mengurangi kesejahteraan generasi yang akan datang. Memang masih menjadi perdebatan tanpa solusi tentang hak generasi saat ini menentukan kesejahteraan generasi yang akan datang. Tetapi untuk keperluan penelaahan terhadap program PEMP, maka diasumsikan harus ada pemerataan kesejahteraan antar generasi.

---

[16] Didin S, Damanhuri. *Tinjauan Kritis Ideologi Liberalisme dan Sosialisme*. (Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri). hal. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap sumberdaya yang ada di lingkungan memiliki harga yang secara ekonomis dapat dikuantifikasikan, tetapi ada yang dapat di tangkap oleh pasar dan ada yang tidak. Karena biasanya sebuah pasar menangkap arti sumberdaya hanya secara finansial. Untuk itu diperlukan teknik valuasi ekonomi, yaitu suatu teknik penilaian ekonomi terhadap sumberdaya tidak hanya secara finansial tetapi dengan memperhitungkan nilai ekonomi total *(Total Economic Value / TEV)* sumberdaya tersebut.[17]

Para ekonomi yang menganut paham teori ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa pasar gagal mengalokasikan atau mengkuantifikasikan sumberdaya (alam) karena beberapa hal, yaitu *Public Goods*, *Externality* dan *Common Property Rosurces*. Oleh karena itu, harus ada kekuatan yang dapat membuat pasar bekerja untuk menghilangkan karakter dari *Public Goods* dan memperhitungkan eksternalitas yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sumberdaya.[18]

Dalam pengelolaan sumberdaya, ekonomi neo-klasik menghindar semaksimal mungkin adanya campur tangan pemerintah. Prinsip-prinsip dalam model pembangunan ekonomi neo-klasik yang ditawarkan yaitu :

1. Pengembangan aset, yaitu lahan/tanah, tenaga kerja dan modal yang bisa dibuat oleh manusia.

---

[17] Didin S, Damanhuri. *Tinjauan Kritis Ideologi Liberalisme dan Sosialisme*. (Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri). hal. 30

[18] Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumberdaya alam bukan merupakan barang yang memiliki nilai marjinal tetapi sumberdaya yang telah tersedia dialam dengan sendirinya (*free*)
3. Harus menjaga agar tidak terjadi *overvalue* terhadap aset yang diciptakan manusia dan *undervalue* terhadap sumberdaya alam.
4. Aset buatan manusia merupakan aset substitusi yang hampir sempurna untuk sumberdaya alam dalam fungsi produksi.
5. Masalah-masalah lingkungan menimbulkan kegagalan pasar yang akhirnya menimbulkan konsep *Market Failure-Goverment Fix*.
6. Permasalahan lingkungan yang muncul harus diselesaikan dengan solusi pasar yang baik.

Pada dasarnya, konsep ekonomi neo-klasik hampir sama dengan konsep ekonomi sumberdaya dan lingkungan seperti yang telah dijelaskan. Inti dari kedua konsep tersebut adalah *Undervalue* terhadap sumberdaya alam dan adanya eksternalitas.

Perbedaannya, ekonomi sumberdaya dan lingkungan menginginkan pengelolaan sumberdaya secara wajar dengan batas tertentu untuk menjaga kesejahteraan generasi yang akan datang dan ekonomi neo-klasik hanya menekankan penilaian yang wajar dalam pemanfaatan sumberdaya alam tanpa terlalu mempermasalahkan *Intra* dan *Inter Generational Equity*.

Dalam pemanfaatan DEP PEMP, hampir dipastikan menggunakan *Natural Resouces* dan *Man Made Assets*. Bisa diduga, bahwa masyarakat pesisir dan nelayan akan *Overvalue* terhadap *Man Made Assets* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undervalue terhadap *Natural Resources*. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat pesisir dan nelayan tentang nilai-nilai dan fungsi ekologis dari setiap ekosistem pesisir yang dimanfaatkan.

Dalam model pengembangan PEMP semestinya dimasukkan program penyadaran dan pengetahuan baik individu maupun kelompok tentang fungsi dan nilai sumberdaya sehingga pengrusakan terhadap sumberdaya berarti penambahan terhadap biaya produksi.

Salah satu caranya adalah pemberian *Property Right* terhadap komunal masyarakat pesisir dan nelayan sehingga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumberdaya lautan, yang saat ini merupakan *Public Goods*. Selain itu, pemanfataan sumberdaya harus meminimalkan eksternalitas baik eksternalitas terhadap orang lain maupun terhadap ekosistem pesisir lainnya, karena eksternalitas akan menambah biaya produksi.

Program PEMP merupakan program pemerintah yang diterapkan secara nasional, dan ini bertentangan dengan konsep ekonomi neo-klasik yang menghindarkan semaksimal mungkin campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya. Konsep neo-klasik sama dengan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (PSPBM). Kelemahan dari PSPBM adalah tidak mengatasi masalah interkomunitas, bersifat lokal, mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, sulit mencapai skala ekonomi dan tingginya biaya institusionalisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Imron tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang dilakukan pada tahun 2007 lebih difokuskan kepada :

   a. Partisipasi dan strategi dalam pengembangan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

   b. Relevansi partisipasi dan strategi pengembangan masyarakat islam.

   Dari dua fokus masalah yang diangkat sehingga dapat diketahui bahwa ternyata tingkat partisipasi masyarakat setempat dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pesisir sangat rendah, hal ini disebabkan banyaknya birokrasi pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat yang ikut campur dan tidak mengedepankan partisipasi masyarakat secara umum.

   Sedangkan dalam penerapan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir juga lebih bersifat *top down,* yang ini berimbas kepada hasil dari sebuah pemberdayaan masyarakat pesisir yang tidak tepat sasaran, karena tidak mengikutsertakan masyarakat yang secara umum adalah pelaksana dari sebuah pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhallil Wasit tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kepulauan Gili Raja Sumenep. Pada tahun 2009 dengan rumusan masalah; Bagaimana Model Pembangunan Masyarakat Pesisir Melalui Kelompok Yasinan dan Arisan di Kepulauan Gili Raja Sumenep. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

model Pembangunan Masyarakat Pesisir Melalui Kelompok Yasinan dan Arisan Di Kepulauan Gili Raja Sumenep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id